



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 752/PL.02.6-SD/03/KPU/IV/2019 Jakarta, 26 April 2019
Sifat : Penting/Segera
Lampiran :
Perihal : Penyampaian *Template* Rancangan
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilu, perolehan kursi, dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan *template* rancangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait dengan:

- a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- c. calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir. Untuk Lampiran rancangan Keputusan dimaksud dapat diunduh pada aplikasi Situng.

Template rancangan Keputusan dimaksud, dapat dijadikan acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan keputusan terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilu, perolehan kursi, dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah

beberapa . . .

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

] 1 enter

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. dst;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ... TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari tanggal*) “*ditulis dalam angka” (...**) “**ditulis dalam huruf”

Tahun . . .

Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul*) “*ditulis dalam angka” (...**) “**ditulis dalam huruf” Waktu Indonesia Bagian

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH PROVINSI
 PEMILIHAN UMUM TAHUN ...**

Lembar 1 Hal. 1

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
	PR																
	JML																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
	PR																
	JML																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
	PR																
	JML																



PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
		KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
		PR															
		JML															
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
4.	Jumlah surat suara yang digunakan																



PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	LK																
		PR																
		JML																
	1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
			PR															
			JML															
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																	
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																	
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	
4.	Jumlah surat suara yang digunakan																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
		PR															
		JML															
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
4.	Jumlah surat suara yang digunakan																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
		KAB/KOTA																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	1. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	2. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	1. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	2. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	1. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	2. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
		KAB/KOTA																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	3. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	4. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	3. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	4. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	3. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	4. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
		KAB/KOTA																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	... PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	... PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	... PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	... PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																



PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																



PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

Lembar 4 Hal. ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



**JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN PERINGKAT SUARA SAH
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [PROVINSI]
 SETIAP PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN**

PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. [NAMA PARTAI]	20	
1	CALON 1	2,333	3
2	CALON 2	1,212	5
3	CALON 3	223	8
4	CALON 4	32	9
5	CALON 5	3,434	2
6	CALON 6	4,433	1
7	CALON 7	232	6
8	CALON 8	232	6
9	CALON 9	4	10
10	CALON 10	2,323	4
	JUMLAH	14,478	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	4. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	5. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	6. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	7. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	8. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	9. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	10. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	11. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	12. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	13. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	14. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	19. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	20. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



3 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NOMOR: / / / /

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

2 enter

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

2,5 cm

1 enter

1 cm

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia . . .

2,5 cm

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

] 1 enter

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. dst;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan

sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari tanggal*) “*ditulis dalam angka” (...**) “**ditulis dalam huruf” Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul*) “*ditulis dalam angka” (...**) “**ditulis dalam huruf” Waktu Indonesia Bagian

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN ...**

Lembar 1 Hal. 1

KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih <i>(B.1+B.2+B.3)</i>	LK																
	PR																
	JML																



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
A. DATA PEMILIH																		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																	
	PR																	
	JML																	
	2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																	
	PR																	
	JML																	
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																	
	PR																	
	JML																	



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
	PR																
	JML																



KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
		PR															
		JML															
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
4.	Jumlah surat suara yang digunakan																



KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
		PR															
		JML															
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
4.	Jumlah surat suara yang digunakan																



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
		PR															
		JML															
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
4.	Jumlah surat suara yang digunakan																



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	1. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	2. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	1. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	2. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	1. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	2. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	3. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	4. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	3. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	4. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	3. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	4. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	... PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	... PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																



KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																



KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

Lembar 4 Hal. ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



**JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN PERINGKAT SUARA SAH
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [KABUPATEN/KOTA]
 SETIAP PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN**

PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. [NAMA PARTAI]		
		20	
1	CALON 1	2,333	3
2	CALON 2	1,212	5
3	CALON 3	223	8
4	CALON 4	32	9
5	CALON 5	3,434	2
6	CALON 6	4,433	1
7	CALON 7	232	6
8	CALON 8	232	6
9	CALON 9	4	10
10	CALON 10	2,323	4
	JUMLAH	14,478	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	4. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	5. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	6. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	7. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	8. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	9. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	10. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	11. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	12. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	13. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	14. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	19. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	20. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI TAHUN 2019

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ,

} 2 enter

2,5 cm ← Menimbang : 0,5 cm

3 cm →

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

d. bahwa . . .

2,5 cm

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. dst;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai
Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Tahun sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di
pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN**

PROVINSI :

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	DAPIL															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A. 1. [NAMA PARTAI]																
2. [NAMA PARTAI]																
3. [NAMA PARTAI]																
4. [NAMA PARTAI]																
5. [NAMA PARTAI]																
6. [NAMA PARTAI]																
7. [NAMA PARTAI]																
8. [NAMA PARTAI]																
9. [NAMA PARTAI]																
10. [NAMA PARTAI]																
11. [NAMA PARTAI]																
12. [NAMA PARTAI]																
13. [NAMA PARTAI]																
14. [NAMA PARTAI]																
19. [NAMA PARTAI]																
20. [NAMA PARTAI]																
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK																

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



3 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA.... TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

2 enter

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota telah menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
..... Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019;

2,5 cm

- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ...
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ...
Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian
perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa . . .

2,5 cm

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.... tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

- Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);



Memperhatikan . . .

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. dst;

1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di
pada tanggal

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ,

3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



LAMPIRAN I.[no.dapil]
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM [KABUPATEN/KOTA]
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [KABUPATEN/KOTA] TAHUN 2019

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :
[KABUPATEN/KOTA] :
PROVINSI :
ALOKASI KURSI :

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI																		JUMLAH PEROLEHAN KURSI			
			1		3		5		7		9		11		13		15		17			19		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT		SUARA SAH	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
19																								
20																								
		JUMLAH																						

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM [KABUPATEN/KOTA]
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [KABUPATEN/KOTA] TAHUN 2019

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN

[KABUPATEN/KOTA] :
PROVINSI :

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(1)	DAPIL (2)	DAPIL (3)	DAPIL (4)	DAPIL (5)	DAPIL (6)	DAPIL (7)	DAPIL (8)	DAPIL (9)	DAPIL (10)	DAPIL (11)	DAPIL (12)	DAPIL (13)	DAPIL (14)	DAPIL (15)	(16)	(17)
A.	1. [NAMA PARTAI]															
	2. [NAMA PARTAI]															
	3. [NAMA PARTAI]															
	4. [NAMA PARTAI]															
	5. [NAMA PARTAI]															
	6. [NAMA PARTAI]															
	7. [NAMA PARTAI]															
	8. [NAMA PARTAI]															
	9. [NAMA PARTAI]															
	10. [NAMA PARTAI]															
	11. [NAMA PARTAI]															
	12. [NAMA PARTAI]															
	13. [NAMA PARTAI]															
	14. [NAMA PARTAI]															
	19. [NAMA PARTAI]															
	20. [NAMA PARTAI]															
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK															

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



3 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ,

2 enter

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... telah menetapkan Keputusan Komisi

2,5 cm

2,5 cm

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Provinsi ... Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Memperhatikan: . . .

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. dst;

1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di
pada tanggal

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ,

3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN [no.dapil]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI A	2	NAMA CALON TERPILIH 1	1,000	1
2	PARTAI A	1	NAMA CALON TERPILIH 2	500	2
3	PARTAI B	4	NAMA CALON TERPILIH 1	1,500	1
4	PARTAI C	3	NAMA CALON TERPILIH 1	800	1
5	PARTAI D	2	NAMA CALON TERPILIH 1	2,000	1
6	PARTAI D	1	NAMA CALON TERPILIH 2	1,200	2
7	PARTAI D	3	NAMA CALON TERPILIH 3	600	3
8	PARTAI D	4	NAMA CALON TERPILIH 4	300	4
9	PARTAI E	6	NAMA CALON TERPILIH 1	600	1
10	PARTAI E	1	NAMA CALON TERPILIH 2	400	2

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



3 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA ... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

2 enter

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

2,5 cm

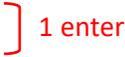
2,5 cm

Umum . . .

Umum Kabupaten/Kota ... telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

] 1 enter

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. dst;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

] 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

] 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ,

] 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN [no.dapil]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI A	2	NAMA CALON TERPILIH 1	1,000	1
2	PARTAI A	1	NAMA CALON TERPILIH 2	500	2
3	PARTAI B	4	NAMA CALON TERPILIH 1	1,500	1
4	PARTAI C	3	NAMA CALON TERPILIH 1	800	1
5	PARTAI D	2	NAMA CALON TERPILIH 1	2,000	1
6	PARTAI D	1	NAMA CALON TERPILIH 2	1,200	2
7	PARTAI D	3	NAMA CALON TERPILIH 3	600	3
8	PARTAI D	4	NAMA CALON TERPILIH 4	300	4
9	PARTAI E	6	NAMA CALON TERPILIH 1	600	1
10	PARTAI E	1	NAMA CALON TERPILIH 2	400	2

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]